



Siaran Pers

Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:

Ged. Nusantara III, Lt. 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta
10270 Indonesia

Website:

<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:

[@bksapdpr](https://twitter.com/bksapdpr)

Instagram:

[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:

[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP DPR RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

Mardani Ali Sera Tekankan Pentingnya *Good Governance dan Good Parliamentary Practice* di Sidang Parlemen Asia (APA)

Baghdad, Irak (12/01/2025) – Parlemen sejatinya merupakan lembaga yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebab, dalam konteks negara demokrasi, suatu kebijakan nasional dapat dikatakan benar-benar merepresentasikan kepentingan publik apabila dalam perumusannya terdapat peran serta parlemen. Khususnya melalui pelaksanaan tugasnya dalam merumuskan legislasi, melakukan pengawasan, menentukan anggaran serta menerima aduan masyarakat. Oleh karena itu, peran parlemen haruslah diperkuat.

Penguatan peran parlemen dapat dilakukan antara lain dengan menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti institusi parlemen internasional semacam IPU, guna mendapatkan wawasan terkait tolak ukur *Good Governance* yang berlaku di negara lain. Demikian dijelaskan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dalam diskusi mengenai *Good Governance dan Good Parliamentary Practice* yang diselenggarakan oleh Majelis Parlemen Asia (APA/*Asian Parliamentary Assembly*), di Baghdad Irak.

Disisi lain, Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga menjelaskan bahwa *Good Parliamentary Practice* juga perlu dijalankan dalam rangka mengimbangi *Good Governance*. Hal tersebut menurutnya dapat dilaksanakan melalui peningkatan keterbukaan dan akses informasi untuk publik yang ingin mengetahui lenih jauh mengenai proses pelaksanaan tugas-tugas Parlemen. “Keterlibatan Parlemen telah menjadi bagian yang integral dan juga sebagai sebuah elemen kunci dalam filosofi pemerintahan terbuka, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai semangat demokrasi”. Demikian disampaikan oleh Ketua BKSAP tersebut dalam diskusinya dengan para perwakilan dari Parlemen negara-negara Asia.

Good Governance dan *Good Parliamentary Practice* sendiri menjadi dua dari delapan tema rancangan resolusi yang dibahas dan didiskusikan pada Sidang Komisi Politik APA di Baghdad, Irak. Dalam sidang yang berlangsung di kota bersejarah tersebut, perwakilan-perwakilan dari parlemen negara-negara anggota APA seperti Turkiye, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Russia dan Pakistan hadir untuk mendiskusikan persoalan-persoalan regional yang dianggap penting. (BKSAP)